

Analisis Pemetaan Penempatan Guru Sekolah Dasar Se-Kota Lhokseumawe

Nurmayuli Nurmayuli^{1✉}, Lailatusaadah², Cut Rizki Mustika³

Manajemen Pendidikan Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia^(1,2)

Pendidikan Fisika, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia⁽³⁾

DOI: [10.31004/obsesi.v8i2.5298](https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i2.5298)

Abstrak

Faktanya di Aceh rasio jumlah guru dan siswa kita ini sekitar 1:16 untuk tingkat SD sendiri, sudah termasuk memadai. Akan tetapi sebaran data guru yang tidak merata, walaupun masih dalam satu zona. Inilah yang menyebabkan, ada sekolah yang mengalami kekurangan guru. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pemetaan penempatan guru SD di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket survey. Hasil penelitian menunjukkan jumlah rombongan belajar sebanyak 621 unit untuk seluruh sekolah SD, sedangkan guru yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 555 orang guru PNS/PPPK. Kemudian dalam rentang 5 tahun kedepan, ada guru yang memasuki usia pensiun sebanyak 88 orang (guru kelas 72 orang, guru PAI 9 orang dan guru PJOK 7 orang). Analisis pemetaan yang terfokus pada guru PNS/PPPK, 5 tahun ke depan semua guru mengalami kekurangan, sedangkan analisis pendataan seluruh guru yang ada, maka hanya guru kelas yang mengalami kekurangan mencapai 35 orang guru untuk di sebarakan pada 3 kecamatan. Jika pemerintah memaksimalkan kinerja guru dengan pemerataan guru, baik PNS/PPPK ataupun non PNS/PPPK yang ada, maka akan lebih efisien pemetaan guru di kota Lhokseumawe. Dapat disimpulkan bahwa pemetaan penempatan guru SD kota Lhokseumawe masih memadai apabila pemerdayaan guru secara keseluruhan yang ada baik PNS/PPPK dan non PNS/PPPK.

Kata Kunci: *guru sekolah dasar; pemetaan guru; siswa sekolah dasar*

Abstract

In fact, in Aceh, the ratio of the number of teachers and students is around 1:16 for the elementary level itself, which is adequate. However, the distribution of teacher data is uneven, even though it is still in one zone. This is what causes, some schools that experience a shortage of teachers. The purpose of this study was to analyze the mapping of elementary school teachers in Lhokseumawe City. The research method used is descriptive qualitative and data collection techniques using survey questionnaires. The results showed that the number of classes was 621 units for all elementary schools, while the teachers recorded in 2022 were 555 civil servant/PPPK teachers. Then in the next 5 years, there are 88 teachers entering retirement age (72 class teachers, 9 PAI teachers, and 7 PJOK teachers). The mapping analysis focused on civil servant / PPPK teachers, in the next 5 years all teachers will experience a shortage, while the data collection analysis of all existing teachers, only class teachers who experience a shortage of 35 teachers will be distributed to 3 sub-districts. If the government maximizes teacher performance by equalizing teachers, both civil servants / PPPK and non-civil servants / PPPK exist, it will be more efficient to map teachers in the city of Lhokseumawe. It can be concluded that the mapping of Lhokseumawe City Elementary School teacher placement is still adequate if there is overall teacher empowerment, both PNS/PPPK and non PNS/PPPK.

Keywords: *elementary school teachers; teacher mapping; elementary school students*

Copyright (c) 2024 Nurmayuli Nurmayuli, et, al.

✉ Corresponding author : Nurmayuli Nurmayuli

Email Address : Nurma.yuli@ar-raniry.ac.id (Banda Aceh, Indonesia)

Received 28 August 2023, Accepted 21 May 2024, Published 24 May 2024

Pendahuluan

Pada Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan negara salah satunya adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang didapat dari proses pendidikan, melalui proses pendidikan dasar sebagai pondasi utama pendidikan di Indonesia. Seperti yang pernah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1994 bahwa wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun mencakup keseluruhan pendidikan pada tingkat dasar (Aakvik, et al., 2010); (Atanasoska & Proyer, 2018). Sehingga setiap warga negara mempunyai kewajiban dan kesempatan untuk, paling tidak, menempuh pendidikan dasar.

Perencanaan pemerintah dalam menggalakan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun di dukung oleh dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada setiap sekolah (Fitriah, A., Sumintono, B., Subekti, N. B., & Hassan, 2013); (Dahlia, N. A., & Khaddafi, 2021), dengan begitu diharapkan semua warga Indonesia dapat mengenyam pendidikan tanpa khawatir dengan biaya yang dibebankan dan memiliki kualitas warga negara yang baik secara pengetahuan dan kemampuan mengelola hidup yang lebih baik.

Peningkatan pendidikan bukan saja, dengan adanya dukungan pemerintah dengan berbagai bantuan yang diberikan, akan tetapi peranan guru sangat penting dalam dunia pendidikan (Haqsanah, 2012); (Nurmayuli, 2023). Keberadaan guru salah satu penentu keberhasilan kualitas peserta didik. Kualitas guru, ditinjau lulusan guru tidak mengemban mengajar pada selingkung ilmu diluar pendidikan akademiknya tentunya akan menjadi polemik tersendiri di lembaga pendidikan, yang mengakibatkan *out put* itu sendiri yaitu peserta didik tidak sesuai harapan.

Peranan guru akan terganggu jika kuantitas guru tidak memenuhi rasio ideal antara jumlah guru dengan peserta didik (Qori, 2022). Jumlah peserta didik melebihi kapasitas guru tentunya akan membuat pelaksanaan pendidikan di sekolah terkendala. Kendala tersebut pada saat proses pembelajaran, guru akan kesulitan membimbing peserta didik melebihi kapasitas seharusnya. Sebaliknya kapasitas guru yang melebihi jumlah peserta didik tentunya membuat guru khususnya guru PNS tidak dapat mengembangkan kariernya dikarenakan kekurangan jam mengajar karena sedikitnya jumlah peserta didik. jika di perhatikan negara juga mengalami kerugian karena tenaga pendidik yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan pendidikan.

Pada data dari Menteri Pendidikan Nasional pada saat membuka Kongres Guru Indonesia (KGI) di Jakarta pada 20 Mei 2010 mengatakan bahwa sebanyak 68 % sekolah di kota kelebihan guru. Di sisi lain, sebanyak 37 % sekolah di desa dan 66 % sekolah di daerah terpencil kekurangan guru. Kemudian informasi terbaru papir Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud pada tahun 2020, tahun ajaran 2020/2021 terdata rasio jumlah guru dan siswa kita ini sekitar 1:16 untuk tingkat SD, 1:15 untuk tingkat SMP dan 1:17 untuk tingkat SMA Artinya kalau dilihat dari jumlah, sudah memadai. Tapi ternyata masalahnya ada pada sebarannya yang tidak merata (Wijayanti & Sutapa, 2015), walaupun masih dalam satu zona.

Masih lemahnya regulasi pemerintah tiap daerah untuk dapat memutasi guru yang jumlahnya melebihi rasio antara guru dan murid (Setyasih et al., 2021) dan kurangnya informasi yang ada di sebuah daerah. Kemudian disisi lain, banyak guru yang di tugaskan pada daerah tertentu meminta pindah (Tita et al., 2021). Selama ini data yang menginput data guru dan peserta didik ada pada data dapodik atau data badan statistik, akan tetapi data tersebut kurang update (Yani, 2010);

Sejauh ini penelitian terdahulu terkait pemetaan penempatan guru yang ada yaitu (Pramono, 2016) menganalisis guru SD, dimana penelitian tersebut di analisis jauh pada tahun 2015 dan 2016, sehingga data tidak relevan digunakan sekarang. Pendataan guru yang di kembangkan (Maulana, 2017) membuat perancangan perangkat lunak untuk menganalisis pendataan guru, penelitian ini membuat rancangan aplikasi untuk mendata guru. Penelitian (Permana & Lesmana, 2019) menganalisis pemetaan guru pada SD berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG), hal senada dengan penelitian (Wijayanti & Sutapa, 2015)

analisis kecukupan guru di Kabupaten purbalingga, menggunakan data analisis berdasarkan data dapodik. Kedua penelitian tersebut memiliki kelemahan pengambilan data yang diambil data aplikasi, sehingga sangat rentan berbeda dengan data di lapangan. Data guru akan berubah setiap tahunnya sehingga membutuhkan data yang terupdate dan kebutuhan setiap daerah berbeda, dan dari penelusuran penelitian terdahulu juga analisis pemetaan guru belum ada pendataan yang langsung mengambil data dari pendataan secara langsung, selama ini menganalisis data berdasarkan data dapodik atau akun data guru secara online (Udang et al., 2021), sehingga penelitian ini diharapkan menjadi salah satu data yang paling akurat untuk menganalisis pendataan penempatan guru.

Berdasarkan observasi pendataan guru, daerah pemerintah daerah Kota Lhokseumawe, hanya melihat data yang tercantum pada dapodik, dimana data dapodik tidak tercantum secara detail, tidak terlihat secara pasti berapa kebutuhan guru sesuai mata pelajaran dan jumlah jam mengajar yang ada di sekolah. Untuk hal itu sudah selayaknya memiliki data pemetaan penempatan guru setiap sekolah yang ada, agar komposisi rasio guru seimbang antara guru dengan peserta didik. Pentingnya informasi pemetaan Penempatan guru yang ada, sehingga di perlukan data analisis pemetaan guru di setiap sekolah.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data sebaran guru secara umum dan sebaran data guru kelas, guru PAI dan guru PJOK yang tersebar pada setiap kecamatan yang ada di tingkat SD khususnya di Kota Lhokseumawe, sebagai rujukan pemerintah setempat dalam mengadakan pengrekrutan dan optimalisasi kinerja guru.

Metodologi

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey (Mahfud & Gumantan, 2020). Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif, bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Nurhayati et al. 2021); (P, Mely, et al., 2022). teknik pengumpulan data menggunakan angket survey yang berisi memberikan data informasi tentang item sebaran guru. Dalam penelitian ini data yang terkumpul dari angket di kelompokkan, di analisis berdasarkan penghitungan berdasarkan standar minimum rasio sebaran guru yang tertuang Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011,SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011, tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil, kemudian disajikan dalam bentuk chart atau diagram untuk memudahkan membaca informasi, dan terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan intepretasi data yang ada (Sugiono, 2013 dalam (Widyangsih, 2020)).

Pendataan guru dilakukan selama kurun waktu 30 hari sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2022, yang dilaksanakan pada seluruh sekolah tingkat SD Se-Kota Lhokseumawe. Adapun populasi dan sampel diambil dari seluruh SD negeri yang berjumlah 58 sekolah yang terbagi pada 4 kecamatan yaitu kecamatan Banda Sakti ada 22 sekolah, kecamatan Muara Satu 8 sekolah, kecamatan Muara Dua 15 sekolah dan kecamatan Blang Mangat 13 sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Data sebaran diklasifikasikan berdasarkan kecamatan, dengan alasan bahwa jika ada sekolah yang memiliki kekurangan jam mengajar (Khusus guru PAI dan PJOK), dapat mengambil jam mengajar disekolah yang lain (Habib et al., n.d.). Untuk tercukupi jam mengajarnya, tetapi masih satu kecamatan. Sebaran data secara umum, memaparkan jumlah sekolah, jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, jumlah guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK yang ada di SD yang di hitung sesuai jenis kepegawaianya, dan adanya keterangan jumlah guru PNS/PPPK yang akan pensiun pada rentang 5 tahun kedepan. Lebih jelasnya akan di deskripsikan untuk setiap sekolah SD yang ada di Kota Lhokseumawe pada tabel-tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran data Sekolah dan Guru SD Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jumlah sekolah	Jumlah rombel	guru kelas		Guru PAI		Guru PJOK		Guru kelas Pensiun 5 tahun ke depan	Guru PAI Pensiun 5 tahun ke depan	Guru PJOK Pensiun 5 tahun ke depan
			PNS/ pppk	Non PNS/ pppk	PNS/ pppk	Non PNS/ pppk	PNS/ pppk	Non PNS/ pppk			
Banda Sakti	22	273	245	46	31	41	26	18	27	6	6
Muara Satu	8	110	107	23	9	15	10	6	16	1	0
Muara Dua	15	125	101	21	17	28	15	6	15	2	1
Blang Mangat	13	113	102	13	7	22	13	6	14	0	0
jumlah	58	621	555	103	64	106	64	36	72	9	7

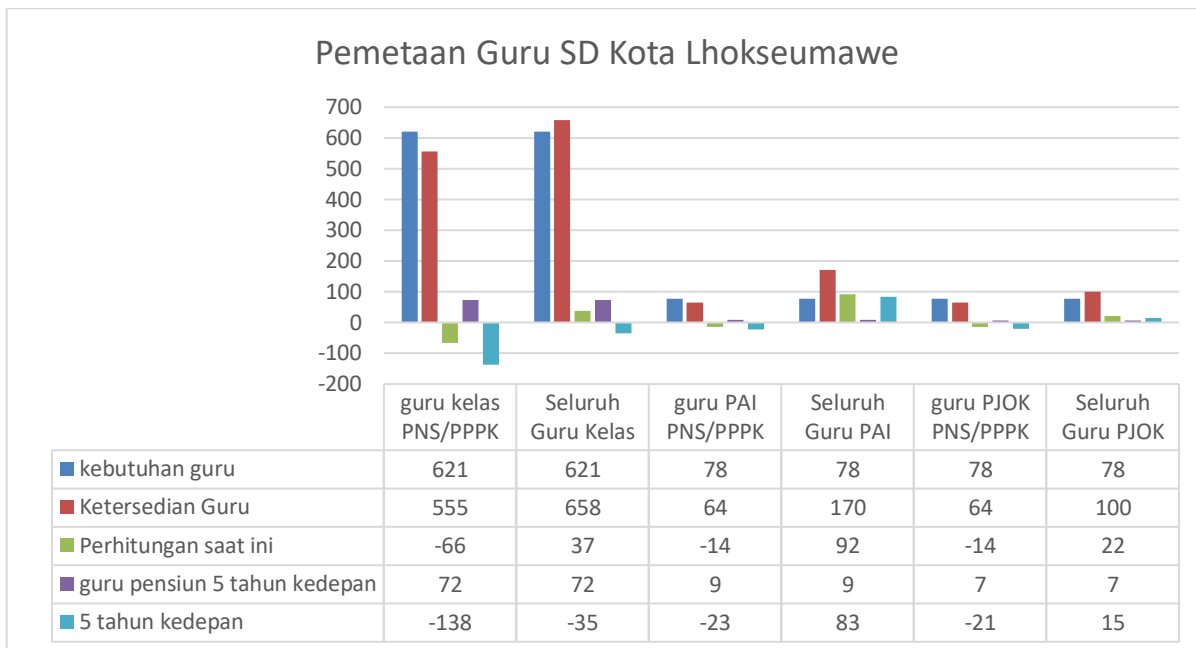
Sebaran data untuk guru SD telah dipaparkan di atas, dimana sebaran data yang akan di analisis pada guru kelas, PAI dan PJOK. Penghitungan analisis pemetaan guru pada sekolah SD di Kota Lhokseumawe tidak memperhatikan ada tidaknya guru bersertifikasi atau tidak, dikarenakan pada hakikatnya guru akan diwajibkan memiliki sertifikasi dengan beban mengajar 24 jam dalam seminggu (Yayuk, 2016), berikut analisis pemetaan guru sekolah SD yang akan di uraikan masing-masing sekolah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010, mengenai penghitungan guru kelas di hitung 1 rombel untuk 1 guru kelas, dikarenakan jam mengajar guru kelas sudah terakumulasi dalam beberapa pembelajaran seperti bahasa indonesia, matematika, prakarya atau mulok yang sudah mencangkupi 24 jam mengajar dalam satu minggu (Pendidikan Nasional, 2010). Tanda (-) mines pada tabel menunjukkan kekurangan, sedangkan tanda plus (+) menunjukkan kelebihan.

Analisis kebutuhan guru di lakukan melihat prinsip pengambilan kebijakan pendidikan. Terdapat 4 (empat) prinsip dalam pengambilan kebijakan pendidikan yaitu: 1) kebijakan berorientasi pada peserta didik; 2) Peningkatan efektivitas PBM; 3) menghindari disparitas mutu pendidikan antar daerah dalam satu kabupaten atau antar kabupaten; dan 4) peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendidikan (Subadi, 2010); (Wijayanti & Sutapa, 2015).

Analisis pemetaan guru SD kota Lhokseumawe, dilakukan penganalisan berdasarkan penghitungan status kepegawaian terfokus pada guru PNS/PPPK seluruh guru, baik guru kelas, guru PAI dan guru PJOK, kebutuhan saat ini masih mengalami kekurangan guru secara berturut-turut yaitu guru kelas membutuhkan 66 orang guru dan untuk guru PAI dan PJOK masing-masing membutuhkan 14 orang guru. Akan tetapi, jika analisis perhitungan tidak melihat status kepegawaian, seluruh guru PNS/PPPK dan non PNS/PPPK di gabung. Maka kebutuhan guru saat ini seluruh bidang ilmu mengalami kelebihan guru.

Kemudian analisis di perhitungkan untuk perhitungan 5 tahun kedepan, dengan memperhitungkan guru - guru yang memasuki masa pensiun dalam jangka waktu tersebut. Maka untuk penghitungan melihat satatus kepegawaian sebagai PNS/PPPK saja. Kebutuhan 5 tahun kedepan semakin meningkat kekurangan guru untuk seluruh bidang, guru kelas paling banyak kekurangan guru hingga mencapai 138 orang. Sedangkan apabila penghitungan tidak memperhatikan status kepegawaian, maka kebutuhan guru kelas menurun, kebutuhan guru kelas hanya 35 orang, sedangkan guru PAI dan guru PJOK mengalami kelebihan guru. dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengrekrut lagi guru PAI dan PJOK, akan tetapi memperdayakan guru non PNS/PPPK secara cermat. Untuk detail data dapat di lihat pada gambaran pemetaan guru SD Kota Lhokseumawe berikut.



Gambar 1. Analisis Pemetaan Seluruh guru SD Kota Lhokseumawe

Secara keseluruhan jumlah guru SD secara keseluruhan tidak memandang status PNS atau non PNS, kota Lhokseumawe masih mengalami kelebihan guru, walaupun di 5 tahun kedepan masih terkurangkan dengan guru yang memasuki masa pensiun. Akan tetapi, nasib guru non PNS ini tidak bisa menuntut haknya untuk diperjuangkan didalam sekolah pemerintah mengingat, belum ada hukum yang kuat untuk perlindungan hak guru non PNS untuk di jadikan PNS kecuali perlindungan hak keselamatan (Rifai, 2019). Namun apabila, perhitungan hanya pada guru PNS/PPPK tentunya seluruh guru kelas, PAI dan PJOK mengalami kekurangan. Hal tersebut tentunya akan memengaruhi kesejahteraan pendidikan(Suryana, 2020). Analisis di atas dihitung berdasarkan keseluruhan kabupaten kota Lhokseumawe, berikut akan di analisis berdasarkan zonasi perkecamatan, agar dapat di Analisa, apakah dalam satu kecamatan itu mengalami kekurangan atau kelebihan untuk guru kelas, PAI dan PJOK sebagai berikut.

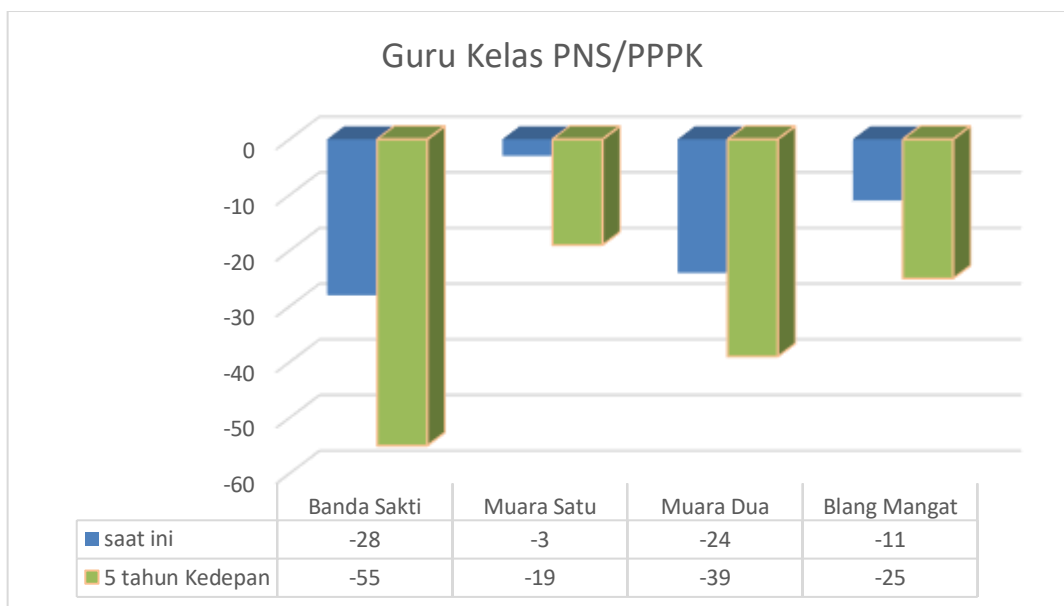
Analisis Guru Kelas

Tabel 2. Analisis Pemetaan Guru kelas PNS/PPPK SD Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Kebutuhan guru	Jumlah Guru kelas yang ada	Pemetaan kekurangan guru saat ini	Jumlah Guru Pensiun 5 tahun kedepan	Pemetaan Guru 5 tahun kedepan
Banda Sakti	273	273	245	-28	-27	-55
Muara Satu	110	110	107	-3	-16	-19
Muara Dua	125	125	101	-24	-15	-39
Blang Mangat	113	113	102	-11	-14	-25
jumlah	621	621	555	-66	-72	-138

Analisis pemetaan guru kelas SD khusus berstatus PNS/PPPK, seluruh kecamatan saat ini mengalami kekurangan guru dengan total keseluruhan kekurangan 66 orang guru. Kemudian dengan adanya penghitungan guru yang memasuki masa pensiun 5 tahun kedepan seluruhnya sebanyak -72, sehingga pemetaan guru kelas untuk 5 tahun kedepan mengalami kekurangan guru semakin meningkat mencapai 138 orang guru.

Jika dilihat pemetaan guru kelas dalam setiap kecamatan kota Lhokseumawe, antara kecukupan guru kelas saat ini dengan kecukupan guru kelas 5 tahun akan datang, seluruh kecamatan mengalami peningkatan kekurangan guru, yang di sebabkan setiap kecamatan mendapati guru yang memasuki usia pensiun. Pada kecamatan Banda Sakti yang paling banyak kekurangan guru kelas seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Analisis Pemetaan guru Kelas PNS/PPPK SD Kota Lhokseumawe

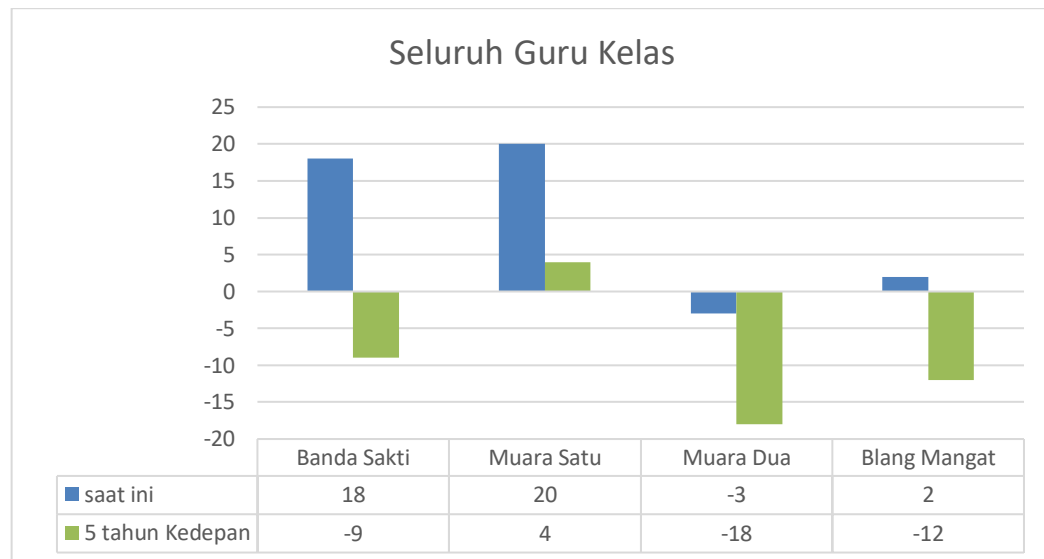
Namun penghitungan guru kelas akan menurun, apabila guru non PNS/PPPK di masukkan dalam pendataan, berikut kalkulasi analisis seluruh guru kelas tanpa memperhatikan status kepegawaian.

Tabel 3. Analisis Pemetaan Seluruh Guru kelas SD Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah Kebutuhan guru	Jumlah Guru kelas yang ada	Pemetaan kelebihan/kekurangan guru saat ini	Jumlah Guru Pensiun thn kedepan	Pemetaan Guru 5 tahun kedepan
Banda Sakti	273	273	291	+18	-27	-9
Muara Satu	110	110	130	+20	-16	+4
Muara Dua	125	125	122	-3	-15	-18
Blang Mangat	113	113	115	+2	-14	-12
jumlah	621	621	658	37	-72	-35

Analisis seluruh guru kelas, jika di tinjau berdasarkan kecamatan ada kecamatan yang mengalami kelebihan guru dan ada juga kecamatan yang mengalami kekurangan guru. Berdasarkan penghitungan secara keseluruhan saat ini guru kelas SD kotA Lhokseumawe mengalami kelebihan guru sebanyak 37 orang guru. setelah 5 tahun kedepan, mendapati guru yang memasuki masa pendiuun sebanyak 72 orang, sehingga kebutuhan guru mengalami kurang sebanyak 35 orang pada masa 5 tahun kedepan.

Kecukupan guru kelas, ketika seluruh guru kelas tanpa memperhatikan status kepegawaian, pada saat ini pada 3 kecamatan mengalami kelebihan guru kelas, hanya kecamatan Muara dua yang mengalami kekurangan guru kelas sebanyak 3 orang guru. Akan tetapi dengan rentang waktu 5 tahun kedepan dengan adanya guru yang sudah memasuki masa pensiun, hanya kecamatan muara satu yang masih kelebihan guru kelas, yang terlihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Analisis Pemetaan Seluruh guru Kelas SD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan analisis guru kelas masih mengalami kekurangan walaupun diperhitungkan tanpa memandang status kepegawaian. Tentunya ini menjadi perhatian pemerintah, mengingat peran guru kelas sangat vital keberadaannya bagi guru tingkat MI. peran guru kelas pada MI harus hadir setiap hari untuk mengelola pembelajaran siswa (Dea Kiki Yestiani, 2020) dan sebagai pembentuk karakter utama kedisiplinan siswa didalam kelas (Setyaningrum et al., 2020). Sesuatu yang tidak mungkin apabila di kelas tidak ada guru kelas, guru kelas bertindak sebagai wali kelas siswa disekolah, tentunya perannya punya tanggung jawab penuh (Swandira Balkis et al., 2016).

Analisis Guru PAI

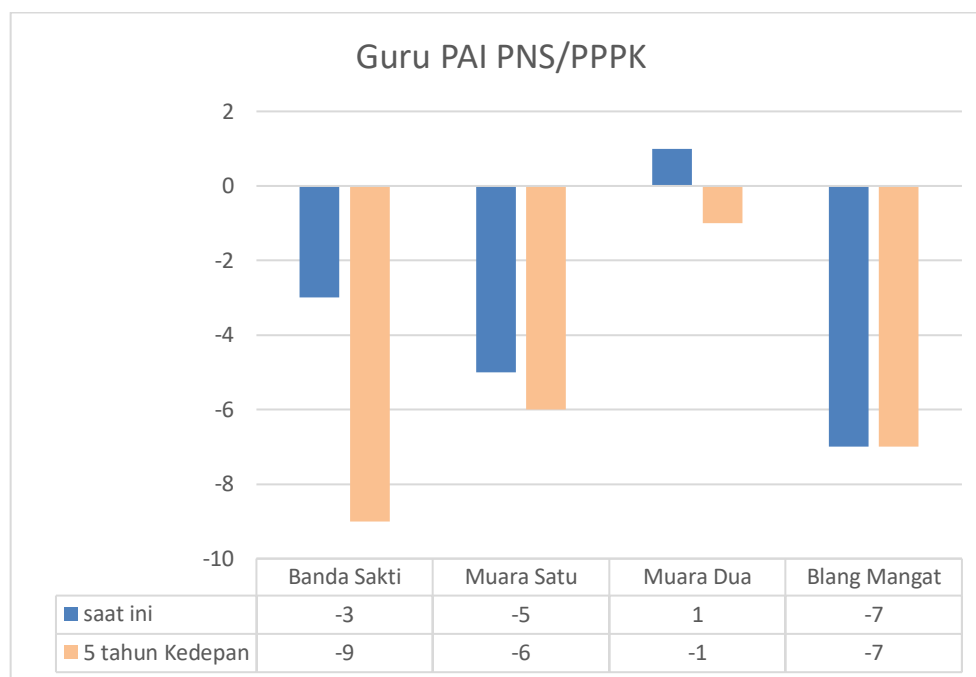
Analisis mata pelajaran PAI dan PJOK berdasarkan struktur kurikulum merdeka yang merujuk pada Keputusan Menti pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022, dapat dilihat bahwa jumlah jam pelajaran perminggu adalah 3 (tiga) jam pelajaran (Yusuf, 2018). Sehingga penghitungan setiap seluruh jumlah rombel di kalikan dengan 3, kemudian di bagi 24 jam mengajar, berikut tabel detail penghitungan pemetaan guru PAI.

Tabel 4. Analisis Pemetaan Guru PAI PNS/PPPK SD Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah total Jam Mapel	Jumlah Kebutuhan guru	Jumlah guru PAI yang ada	Pemetaan kelebihan/kekurangan guru saat ini	Jumlah Guru Pensiun 5 thn kedepan	Pemetaan Guru 5 tahun kedepan
Banda Sakti	273	$3 \times 273 = 819$	$819/24 = 34$	31	-3	-6	-9
Muara Satu	110	330	14	9	-5	-1	-6
Muara Dua	125	375	16	17	+1	-2	-1
Blang Mangat	113	339	14	7	-7	0	-7
jumlah	621	1863	78	64	-14	-9	-23

Analisis pemetaan guru PAI SD khusus berstatus PNS/PPPK, seluruh kecamatan saat ini mengalami kekurangan guru dengan total keseluruhan kekurangan 14 orang guru. Kemudian dengan adanya penghitungan guru yang memasuki masa pensiun 5 tahun kedepan seluruhnya sebanyak 9 orang guru, sehingga pemetaan guru PAI untuk 5 tahun kedepan mengalami kekurangan guru semakin meningkat mencapai 23 orang guru.

Kecukupan guru PAI pada saat ini, hanya pada muara dua yang memiliki 1 kelebihan guru PAI, untuk ketiga kecamatan lainnya masih mengalami kekurangan guru. Untuk 5 tahun kedepan kecukupan guru PAI mengalami kekurangan seluruh kecamatan, untuk kecamatan Blang Mangat tidak memiliki guru yang memasuki masa pensiun, akan tetapi jika tidak ada pengrekrutan pada 5 tahun kedepan, akan mengalami kekurangan yang sama besar seperti kondisi saat ini sebagaimana yang terlihat pada gambar 4.



Gambar 4. Analisis Pemetaan guru PAI PNS/PPPK SD Kota Lhokseumawe

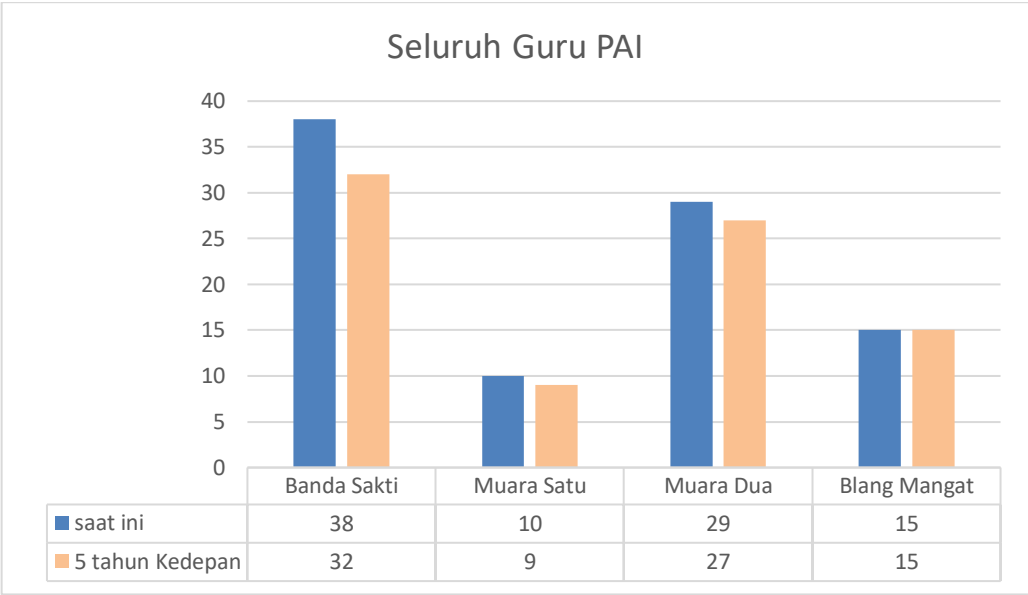
Namun penghitungan guru PAI akan mengalami kelebihan guru, apabila guru non PNS/PPPK di masukkan dalam pendataan, berikut kalkulasi analisis seluruh guru PAI tanpa memperhatikan status kepegawaian.

Tabel 5. Analisis Pemetaan Seluruh Guru PAI SD Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah total Jam Mapel	Jumlah Kebutuhan guru	Jumlah Guru PAI yang ada	Pemetaan kelebihan/kekurangan guru saat ini	Jumlah Guru Pensiun 5 thn kedepan	Pemetaan Guru 5 tahun kedepan
Banda Sakti	273	$3 \times 273 = 819$	$819/24 = 34$	72	+38	-6	+32
Muara Satu	110	330	14	24	+10	-1	+9
Muara Dua	125	375	16	45	+29	-2	+27
Blang Mangat	113	339	14	29	+15	0	+15
jumlah	621	1863	78	170	+92	-9	+83

Analisis seluruh guru PAI, jika di tinjau berdasarkan kecamatan, seluruh kecamatan mengalami kelebihan guru. Berdasarkan penghitungan secara keseluruhan saat ini guru PAI SD kota Lhokseumawe mengalami kelebihan guru sebanyak 92 orang guru. setelah 5 tahun kedepan, mendapati guru yang memasuki masa pensiun sebanyak 9 orang, sehingga pemetaan guru masih mengalami kelebihan sebanyak 83 orang pada masa 5 tahun kedepan.

Pada gambar 5, terlihat kecukupan guru PAI dengan menghitung seluruh guru yang ada, baik pemetaan saat ini ataupun setelah 5 tahun kedepan, seluruh kecamatan mengalami kelebihan guru PAI.



Gambar 5. Analisis Pemetaan Seluruh guru PAI SD Kota Lhokseumawe

Analisis guru PAI apabila dihitung secara keseluruhan mengalami kelebihan setiap kecamatan untuk 5 tahun kedepan, namun apabila dihitung melihat status PNS/PPPK mengalami kekurangan. Namun kekurangan ini tidak begitu signifikan. Untuk itu mengatasi guru PAI yang mengalami kelebihan tentunya dapat jadi masukan bagi pemerintah untuk mengupayakan guru PAI menjadi perannya sebagai guru kelas, mengingat hasil data analisis guru kelas secara keseluruhan mengalami kekurangan. Faktanya peranan guru PAI dalam pembentukan akhlak murid disekolah (Kuswanto et al., 2014) dan dapat dijadikan konselor dalam mengatasi permasalahan murid (Yuhana & Aminy, 2019), sehingga sangatlah pantas guru PAI dimanfaatkan juga menjadi guru kelas.

Analisis Guru PJOK

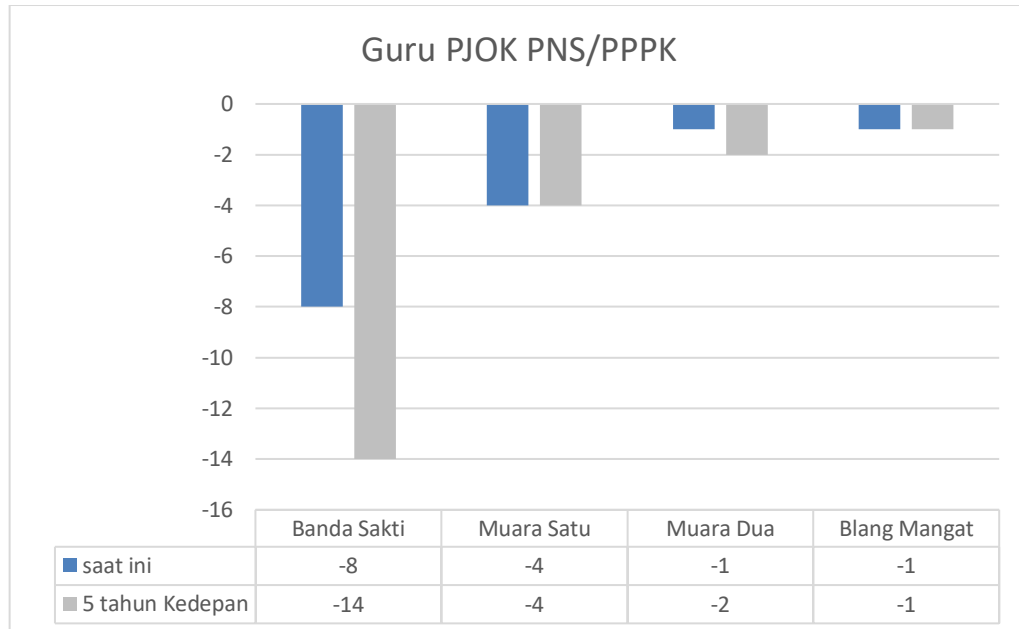
Analisis guru PJOK, penghitungan analisis guru PJOK sama dengan guru PAI, hanya memiliki akumulasi 3 jam pelajaran setiap minggunya, sehingga jika dalam 1 sekolah hanya memiliki 6 rombel cukuplah hanya 1 guru PJOK. Berikut analisis pemetaan guru PJOK terkhusus penghitungan pada guru PNS/PPPK.

Tabel 6. Analisis Pemetaan Penempatan Guru PJOK PNS/PPPK SD Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah total Jam Mapel	Jumlah Kebutuhan guru	Jumlah guru PJOK yang ada	Pemetaan kelebihan/kekurangan guru saat ini	Jumlah Guru Pensiun 5 thn kedepan	Pemetaan Guru 5 tahun kedepan
Banda Sakti	273	$3 \times 273 = 819$	$819/24 = 34$	26	-8	-6	-14
Muara Satu	110	330	14	10	-4	0	-4
Muara Dua	125	375	16	15	-1	-1	-2
Blang Mangat	113	339	14	13	-1	0	-1
jumlah	621	1863	78	64	-14	-7	-21

Analisis pemetaan penempatan guru PJOK SD khusus berstatus PNS/PPPK, seluruh kecamatan saat ini mengalami kekurangan guru dengan total keseluruhan kekurangan 14 orang guru. Kemudian dengan adanya penghitungan guru yang memasuki masa pensiun 5 tahun kedepan seluruhnya sebanyak 7 orang guru, sehingga pemetaan guru PJOK untuk 5 tahun kedepan mengalami kekurangan guru semakin meningkat mencapai 21 orang guru.

Kecukupan guru PJOK seluruh kecamatan mengalami kekurangan guru, antara hasil analisis saat ini dengan 5 tahun akan datang tidak ada perbedaan signifikan. Seperti terlihat pada gambar 6, pada kecamatan Mura Satu dan Blang Mangat, jika tidak ada perekrutan guru PJOK dalam 5 tahun kedepan kedua kecamatan tersebut memiliki komposisi kekurangan guru yang sama.



Gambar 6. Analisis Pemetaan guru PJOK PNS/PPPK SD Kota Lhokseumawe

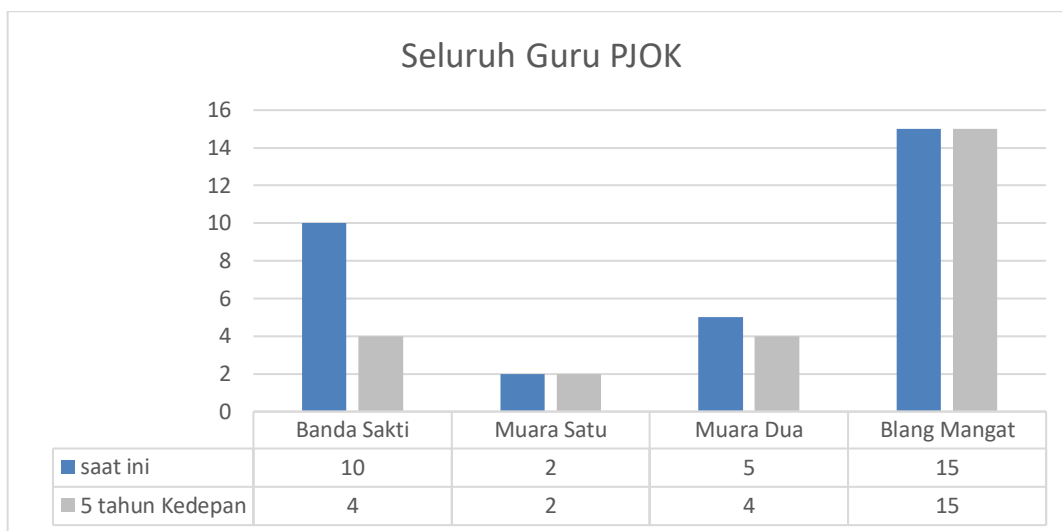
Penghitungan guru PJOK akan mengalami kelebihan guru, apabila guru non PNS/PPPK di masukkan dalam pendataan, berikut kalkulasi analisis seluruh guru PJOK tanpa memperhatikan status kepegawaian.

Tabel 7. Analisis Pemetaan Seluruh Guru PJOK SD Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jumlah Rombel	Jumlah total Jam Mapel	Jumlah Kebutuhan guru	Jumlah Guru PJOK yang ada	Pemetaan kelebihan/kekurangan guru saat ini	Jumlah Guru Pensiun 5 thn kedepan	Pemetaan Guru 5 tahun kedepan
Banda Sakti	273	$3 \times 273 = 819$	$819/24 = 34$	44	+10	-6	+4
Muara Satu	110	330	14	16	+2	0	+2
Muara Dua	125	375	16	21	+5	-1	+4
Blang Mangat	113	339	14	19	+15	0	+15
jumlah	621	1863	78	100	+22	-7	+15

Analisis seluruh guru PJOK, jika di tinjau berdasarkan kecamatan, seluruh kecamatan mengalami kelebihan guru. Berdasarkan penghitungan secara keseluruhan saat ini guru PJOK SD mengalami kelebihan guru sebanyak 22 orang guru. Setelah 5 tahun kedepan, mendapati guru yang memasuki masa pensiun sebanyak 7 orang, sehingga pemetaan guru masih mengalami kelebihan sebanyak 15 orang pada masa 5 tahun kedepan.

Analisis kecukupan guru PJOK baik saat ini ataupun 5 tahun kedepan, seluruh kecamatan mengalami kelebihan seperti terlihat pada gambar 7, bahkan ada dua kecamatan yaitu Muara Satu dan Blang Mangat mengalami konstan kelebihan guru untuk saat ini sampai 5 tahun kedepan.



Melihat fenomena analisis jumlah guru PJOK, berada dalam status kelebihan baik perhitungan secara keseluruhan ataupun secara status kepangkatan PNS/PPPK. Bisa disimpulkan bahwa setiap sekolah memiliki guru PJOK yang mengaami kekurangan jammengajar. Namun dalam praktinya dilapangan dikarenakan status guru PJOK banyak yang non ASN maka kekurangan jam mengajar menjadi tidak bermasalah bagiguru tersebut. Tetapi apabila kita lihat dari segi keefektifitasannya sangat tidak efektif.

Pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah daerah dapat mempertmbangkan data ini sebelum perekrutan pegawai PPPK formasi guru kedepan, jika perekrutan di buat lebih mendahulukan guru yang sudah bersatatus mengabdi disekolah. Agar tidak terjadi penumpukan tenaga guru diseklah atau daerah tertentu. Kemudia untuk mengatasi problema ada sekolah kelebihan dan ada sekolah yang kurang guru, pemerintah dapat mengambil kebijakan mutasi silang bagi sekolah yang kelebihan (Kamaria, 2021). Selain itu pemerintah dapat menggunakan pemanfatan kopetensi ganda (Dewanto, S. A., & Marwanti, 2017), seperti pemanfaat guru PAI menjadi guru kelas sebagai antisipasi keurangan guru kelas sekaligus mengatasi kelebihan guru PAI.

Dalam dunia pendidikan indonesia problem-problem yang masih menjadi PR bagi pemerintah adalah pemetaan guru yang belum proporsi disetiap daerah(Amelia, 2019). Hal tersebut salah satu efek kurangnya koordinasi antara Pemerintah daerah, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam pengembangan profesionalisme guru (Winingsih et al., 2013).

Simpulan

Pemetaan penempatan guru SD di Kota Lhokseumawe pada guru kelas, guru PAI dan guru PJOK, secara keseluruhan mengalami kekurangan guru sampai 5 tahun kedepan. Hal tersebut terjadi, apabila guru yang mengajar pada sekolah hanya guru yang bersatatus PNS/PPPK. Namun jika penghitungan atau pendataan dilakukan pada semua guru yang berstatus PNS/PPPK atau non PNS/PPPK, maka hanya guru kelas yang masih mengalami kekurangan guru sebanyak 35 guru untuk 3 kecamatan yang mengalami kekurangan guru kelas. Pada pemerintah setempat agar dapat mengambil kebijakan untuk mengadakan pengadaan guru kelas SD Negeri yang mengalami kekurangan atau kebutuhan guru terkhusus pada guru mata pelajaran yang mengalami kekurangan guru. Dan juga mengadakan mutasi atau sistem pertukaran silang antar sekolah agar tercukupi beban jam guru bagi sekolah yang masih memiliki jumlah rombongan belajar sedikit. Hal tersebut diharapkan dapat teratasi rasio guru dan siswa yang ideal, sehingga efektivitas sumber daya pendidikan terlaksana dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya dalam Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe yang telah mengizinkan peneliti untuk meneliti terkait analisis jumlah guru. dan taklupa pula terimakasih peneliti kepada seluruh kepala sekolah SD Kota Lhokseumawe beserta pegawainya atas bentuk kerjasamanya dalam membantu peneliti memperoleh data.

Daftar Pustaka

- Aakvik, A., Salvanes, K. G., & Vaage, K. (2010). Measuring heterogeneity in the returns to education using an education reform. *European Economic Review*, 54(4), 483–500. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2009.09.001>
- Alawi, A. H. I. (2019). Kinerja Guru Dan Hubungannya Dengan Kualitas Hasil Belajar Siswa Madrasah Aliyah. *Journal of Islamic Education*.
- Amelia, C. (2019). *Problematika Pendidikan Di Indonesia*. <http://semnasfis.unimed.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/22.-Chairunisa.pdf>
- Atanasoska, T., & Proyer, M. (2018). On the brink of education: Experiences of refugees beyond the age of compulsory education in Austria. *European Educational Research Journal*, 17(2), 271–289. <https://doi.org/10.1177/1474904118760922>
- Dahlia, N. A., & Khaddafi, M. (2021). Analysis of Stakeholder Perception on Transparency, Accountability, And Effectivity in School Operational Assistance Funds Management For Junior High School Level in North Aceh Regency. *Journal of Management Analytical and Solution*, 1(3). <https://talenta.usu.ac.id/jomas/article/view/6984>
- Dea Kiki Yestiani, N. Z. (2020). Peran Guru dalam Pembelajaran pada Siswa Sekolah Dasar. *FONDATIA*, 4(1). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia/article/view/515>
- Dewanto, S. A., & Marwanti, M. (2017). Program Kompetensi Ganda Untuk Mengatasi Kekurangan Guru Produktif di SMK. *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana*, 12(1).
- Fitriah, A., Sumintono, B., Subekti, N. B., & Hassan, Z. (2013). A different result of community participation in education: an Indonesian case study of parental participation in public primary schools. *Asia Pacific Education Review*, 14, 483–493. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12564-013-9275-8>
- Haqsanah, A. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Pustaka Setia.
- Kamaria, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 82–96. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4970644>
- Kuswanto, E., Lanjutan, S., Pertama, T., & Demak, D. (2014). Peranan Guru PAI dalam Pendidikan Akhlak di Sekolah. *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 6(2), 194–220. <https://doi.org/10.18326/MDR.V6I2.194-220>
- Mahfud, I., & Gumantan, A. (2020). Survey Of Student Anxiety Levels During The Covid-19 Pandemic. *Jp.Jok (Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan)*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.33503/jp.jok.v4i1.1103>
- Maulana, Y. I. (2017). Perancangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Pendataan Guru Dan Sekolah (SINDARU) Pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 13(1), 21–27. <https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/pilar/article/view/10>
- Nurmayuli, Mely Patrizia, S. U. (2022). (Educational Supervisions strategy In Schools and Madrasah). *ICONIC*, October, 27–28.

- <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/view/5971>
- Nurmayuli. (2023). Development of an Islamic Education Management Philosophy e- Module through the Canva Application. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 9(01), 97–108. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v9i01.7963>.INTRODUCTION
- Pendidikan Nasional, M. (2010). *Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional*.
- Permana, R., & Lesmana, C. (2019). Pemetaan Kebutuhan Guru Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Berbasis Sistem Informasi Dan Geografis (Sig). *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 2(2), 51–59. <https://doi.org/10.47165/jpin.v2i2.77>
- Pramono, M. S. (2016). *Analisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Di Kota Cimahi Tahun 2015-2020* [Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/28042/>
- Qori, M. (2022). *Pengelompokkan Wilayah Berdasarkan Rasio Guru-Murid Pada Jenjang Pendidikan Menggunakan Algoritma K-Means*. 1, 33–38. <https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jid/article/view/898>
- Rifai, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. | Unizar Law Review (ULR). *Unizar Law Riview*, 2(2), 158–168. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/181>
- Setyaningrum, Y., Rais, R., & Setianingsih, E. S. (2020). Peran Guru Kelas dalam Pembentukan Karakter Disiplin pada Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 3(3), 520–526. <https://doi.org/10.23887/JIPPG.V3I3.29752>
- Setyasih, I., Hudiyono, Y., Isfihani, Trinita, A., & Anwar, Y. (2021). KAJIAN Pengelolaan Guru Sd Dan Smp Negeri Di Kota Samarinda: *Jurnal Riset Inossa: Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam*, 3(1), 15–31. <https://doi.org/10.17977/UM009V25I12016P018>
- Subadi, T. (2010). *Lesson Study: Berbasis PTK*. BP-FKIP UMS.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/EDUKASI.V14I1.971>
- Swandira Balkis, A., Mujab Masykur, A., & Soedarto Tembalang Semarang, J. S. (2016). Memahami Subjective Well-Being Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri (Sebuah Studi Kualitatif Fenomenologis). *Jurnal EMPATI*, 5(2), 223–228. <https://doi.org/10.14710/EMPATI.2016.15047>
- Tita Tri Antika Pangestuti, Ratna Wulandari, E. miftahul J. & F. S. (2021). Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru Pns Menjadi Pppk. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1133–1138. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/833>
- Udang, O. S., Tabaru, M., Sampetoding, E. A. M., & Manapa, E. S. (2021). Pengolahan Data Siswa SMA Negeri 1 Sambuara Kabupaten Kepulauan Talaud Pada Aplikasi DAPODIK. *Journal Dynamic Saint*, 6(1), 7–11. <https://doi.org/10.47178/dynamicsaint.v6i1.1193>
- Widyangsih, O. (2020). Penerapan Pembelajaran Online (Dalam Jaringan) Di Sekolah Dasar. *Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(02), 50. <https://doi.org/10.30742/tpd.v2i2.1106>
- Wijayanti, W., & Sutapa, M. (2015). Penataan dan Pemerataan Guru: Analisis Kebutuhan, Ketersediaan, dan Kecukupan Guru Di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. *Teknodika*, 13(1), 85–100.

<https://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial/article/view/1802>

- Winingsih, L. H., Pemerintah Daerah, P., dan, L. P., dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru, T., Winingsih Pusat Penelitian Kebijakan, L. H., Gedung Lantai, K. E., Jenderal Sudirman, J., & Pusat, J. (2013). Peran Pemerintah Daerah, LPMP dan P4TK Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 579–593. <https://doi.org/10.24832/JPNK.V19I4.311>
- Yani, A. (2010). Kebijakan Distribusi Guru Melalui Participatory Management Pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal MANAJERIAL*, 9(2), 47–54. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v9i2.1802>
- Yayuk, E. (2016). Pemetaan Kompetensi Guru Bersertifikat Pendidik Untuk Pemanfaatan Media Tik Dalam Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 4(02), 205–215. <https://doi.org/10.25273/pe.v4i02.319>
- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.36667/JPPi.V7I1.357>
- Yusuf, W. F. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Al-Murabbi*, 3(2), 263–278. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/1097>